PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendalu		5/8-24
2.	Kabid PPM		5/8 24
3	Perencana Ahli		5/8 24
4.			
5.			

LAMPIRAN XXXIV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 878 /K/411.013/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

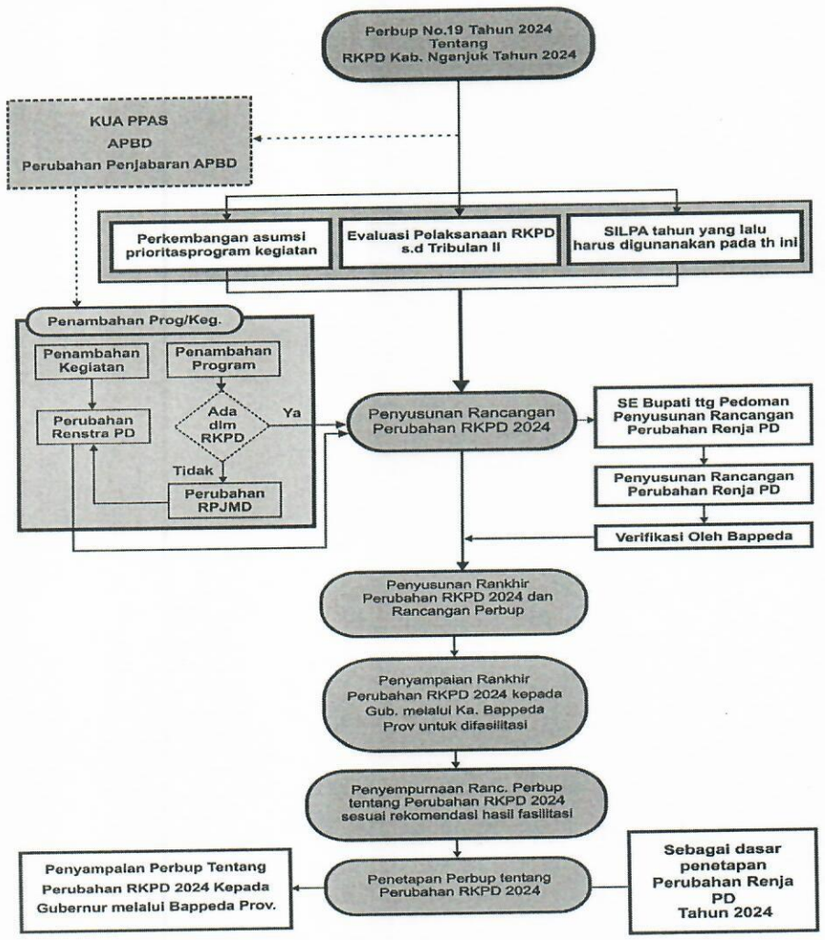
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Perbub Nomer 7 Tahun 2023 Tentang Rencan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026
47. Perbub Nomer 9 Tahun 2023 Tentang Restra PD Kabupaten Tahun 2024 – 2026
48. Perbub Nomer 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten NganjukTahun 2024 Nomor 16)

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Patiabrowo
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan
- 4.2. Rencana Tindak Lanujut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja yang terdiri dari 15 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal, yaitu:

A. Belanja Operasi sebesar Rp 3,231,971,8500.00 terdiri atas :

a. Belanja Pegawai Rp 2,470,627,000.00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 761,344,850.00

B. Belanja Modal sebesar Rp 123,670,200.00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 123,670,200.00

Adapun serapan Anggaran per Program Kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024 telah melaksanakan **6 (enam)** program utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja yang terdiri dari **15 Kegiatan** dan **38 Sub Kegiatan**.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal, yaitu sebesar Rp. 3.405.497.000,00 (Perbub No. 04 Tahun 2024 Perubahan II)

Adapun Serapan Anggaran / Realisasi per Program Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil program ini adalah meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan Patianrowo, dengan anggaran **Rp. 3.044.630.900,00** realisasi Rp. **1.107.622.856,00** atau penyerapan dana sebesar **32,52%**

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib, dengan anggaran **Rp. 59.592.850,00** realisasi **Rp. 6.735.000,00** atau penyerapan dana sebesar **11,30 %**

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan, dengan anggaran **Rp. 116.318.150,00** realisasi **Rp. 14.965.000,00** atau penyerapan anggaran sebesar **12,87 %**

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan, dengan anggaran sebesar **Rp 31.306.700,00** realisasi **Rp 16.405.000,00** atau penyerapan anggaran sebesar **52,40 %**

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan anggaran **Rp 94.725.000,00** realisasi **Rp 50.787.000,00** atau penyerapan dana sebesar **53,62 %.**

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah meningkatnya ProsentaseDesa/Kelurahan Cepat Berkembang, dengan anggaran **Rp 59.923.950,00** realisasi **Rp 4.195.000,00** atau penyerapan dana sebesar **7,12%**

1. Analisis realisasi output kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024 triwulan II
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target 4 (empat) dokumen dan belum terealisasi. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Target 62 (enam puluh dua) Dokumen dan Terealisasi 3 (tiga) dokumen yaitu Gaji dan TPP. Hal ini menunjukan kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Target 51 (lima puluh satu) Dokumen dan belum terealisasi. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Target 7 (tujuh) dokumen dan Realisasi 3 (tiga) dokumen yaitu pembelian peralatan listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistic, bahan cetakan dan penggandaan, SPPD. Hal ini menunjukan kegiatan yang direncanakan di triwulan I ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Target 14 (empat belas) Unit dan Realisasi 2 (dua) Unit yaitu Pembelian Karpet dan Pembelian Komputer AIO. Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai sesuai dengan target di triwulan 1.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Target 24 (dua puluh empat) Laporan dan Realisasi 6 (enam) laporan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumberdaya Air dan Listrik. Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 12 (delapan belas) Unit dan Realisasi 12 (dua belas) Unit yaitu hanya yang terealisasi pembelian BBM saja.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan target 8 (delapan) laporan dan terealisasi hanya 1 (satu) laporan, yaitu kegiatan rapat PUG.
9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saran Pelayanan Umum, dengan target 3 (tiga) dokumen dan sampai saat ini belum terealisasi karena kegiatan tersebut di triwulan II.

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan target 3 (tiga) laporan dan belum terealisasi karena kegiatan tersebut berada di triwulan II.
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan target 97 lembaga kemasyarakatan dan terealisasi 132 lembaga kemasyarakatan, dikarenakan adanya musrenbang tingkat kecamatan.
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target 8 laporan dan terealisasi 1 laporan, kegiatan terebut adalah rapat pembinaan satlinmas.
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 250 orang dan belum terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut berada di triwulan II.
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan target 11 Desa, terealisasi 11 Desa itu dikarenakan adan kegiatan pembinaan keuangan desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam triwulan I belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

2. Analisis realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2024 triwulan I
   Untuk realisasi keuangan Kecamatan Patianrowo pada sampai dengan triwulan I tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 203.571.375,00 dengan anggaran Rp. 3.355.624.050,00 sehingga realisasi yang telah tercapai yaitu 6,07%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan Patianrowo	3.456.615.000	2.052.364.523	2.718.710.920	1.928.940.666	70,95	2.886.738.100	6.868.043.289	198,69

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	*11.000.000*	1.512.000	*1.671.000*	*0*	0	11.906.000	13.418.000	121,98
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	0	0	0	0	3.452.000	3.452.000	98,63
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	1.512.000	*1.671.000*	*0*	0	4.416.000	5.928.000	148,20
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	0	0	0	0	4.038.000	4.038.000	115,37
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*2.666.000.000*	1.617.374.123	2.099.502.420	1.517.067.851	72,26	2.426.575.500	5.561.017.474	208,59
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.660.000.000	1.613.699.123	2.099.502.420	1.514.796.851	72,15	2.417.422.000	5.545.917.974	208,49
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000	0	0	0	0	1.956.000	1.956.000	78,24

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	2.885.000	2.587.500	2.271.000	87,77	3.669.500	8.825.500	588,37
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	790.000	*815.000*	*0*	0	3.528.000	4.318.000	215,90
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*45.600.000*	2.220.000	14.760.000	12.840.000	86,99	20.620.000	35.680.000	78,25
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.750.000	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20.000.000	2.220.000	14.760.000	12.840.000	86,99	10.620.000	25.680.000	128,40
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.100.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	98,04

7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.750.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	57,14
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	*155.650.000*	88.635.750	*84.616.450*	*78.681.683*	92,99	254.635.700	421.953.133	271,09
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28.640.000	10.959.000,00	9.636.000	8.839.800	91,74	20.693.200	40.492.000	141,38
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.500.000	142.838	0	0	0	11.968.000	12.110.838	220,20
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.000.000	29.603.750	*36.245.200*	*34.665.383*	95,64	40.144.300	104.413.433	232,03
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17.710.000	8.155.250	8.155.250	6.511.500	79,84	18.100.000	32.766.750	185,02
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.050.000	0	0	0	0	6.700.000	6.700.000	33,42
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	14.834.000	30.080.000	28.240.000	93,88	33.360.000	76.434.000	254,78

7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.750.000	0	0	0	0	10.350.000	10.350.000	118,29
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	*195.500.000*	95.855.200	112.712.800	112.500.000	99,81	113.320.200	321.675.400	164,54
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75.000.000	37.455.200	21.850.000	21.850.000	100	34.793.200	94.098.400	125,46
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120.500.000	58.400.000	90.862.800	90.650.000	99,77	78.527.000	227.577.000	188,86
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*137.615.000*	85.100.000	166.600.000	58.360.512	35,03	*105.950.000*	249.410.512	181,24
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.015.000	45.500.000	*45.880.000*	*42.230.000*	92,04	81.700.000	169.430.000	167,73
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.600.000	39.600.000	39.600.000	16.130.512	40,73	24.250.000	79.980.512	218,53
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	*245.250.000*	161.667.450	*238.848.250*	*149.490.620*	62,59	*224.943.700*	536.101.770	218,59

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45.000.000	38.567.300	52.923.200	49.231.000	93,02	56.507.700	144.306.000	320,68
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9.750.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	61,54
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.500.000	13.100.000	17.200.000	9.920.000	57,67	11.000.000	34.020.000	324,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180.000.000	110.000.150	*97.902.750*	*90.339.620*	92,27	151.436.000	351.775.770	195,43
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	104.250.000	64.355.000	267.963.750	52.675.000	19,66	59.592.850	176.622.850	169,42
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*90.000.000*	59.111.900	263.764.250	48.330.000	18,32	*41.696.150*	149.138.050	165,71

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90.000.000	59.111.900	49.150.200	48.330.000	98,33	41.696.150	149.138.050	165,71
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*8.750.000*	5.243.100	4.199.500	4.345.000	103,46	*7.548.350*	17.136.450	195,85
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.750.000	5.243.100	*4.798.350*	*4.345.000*	90,55	7.548.350	17.136.450	195,85
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*5.500.000*	0	0	0	0	*10.348.350*	10.348.350	188,15
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.500.000	0	0	0	0	10.348.350	10.348.350	188,15

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	60.000.000	25.122.950	34.531.500	29.855.000	86,46	66.462.650	121.440.600	202,40
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	*60.000.000*	25.122.950	*34.531.500*	29.855.000	86,46	66.462.650	121.440.600	202,40
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40.000.000	11.081.500	18.481.500	16.765.000	90,71	20.097.800	47.944.300	119,86
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.000.000	14.041.450	16.050.000	13.090.000	81,56	46.364.850	73.496.300	367,48
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang	25.500.000	0	0	0	0	31.306.700	31.306.700	122,77

		ditangani								
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*25.500.000*	0	*0*	*0*	0	*31.306.700*	31.306.700	122,77
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	0	0	0	0	19.856.700	19.856.700	132,38
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.500.000	0	0	0	0	11.450.000	11.450.000	109,05
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	275.000.000	2.300.530	138.867.000	135.082.000	97,27	94.725.000	232.107.530	84,40

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	*275.000.000*	2.300.530	138.867.000	135.082.000	97,27	94.725.000	232.107.530	84,40
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	275.000.000	2.300.530	138.867.000	135.082.000	97,27	94.725.000	232.107.530	84,40
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	41.000.000	48.466.600	36.966.800	32.680.000	88,40	58.923.950	140.070.550	341,64

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	*41.000.000*	48.466.600	36.966.800	32.680.000	88,40	58.923.950	140.070.550	341,64
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.500.000	17.592.000	18.442.000	17.050.000	92,45	50.225.600	84.867.600	278,25
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.500.000	0	0	0	0	8.698.350	8.698.350	82,84

1. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

   Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Patianrowo tahun 2023 bisa tercapai seperti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan sudah terisinya Pejabat Struktural di Kecamatan dan Kelurahan sehinga berpengaruh pada serapan anggaran.

   Dan banyak pula pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dapat mencapai target yang ditentukan, dikarenakan PPTK bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai target sebagaimana yang tercantum dalam DPA.

2. Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

   Untuk realisasi keuangan Kecamatan Patianrowo pada tahun 2024 yaitu dari Pagu Anggaran sebesar Rp 3.576.532.528,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp 2.504.589.008,00 sehingga realisasi yang telah tercapai yaitu 70,03%.

   (Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023)

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,29	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
a. Adanya ASN yang sudah memasuki masa pensiun b. Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya c. PPK dan PPTK belum maksimal dalam mengambil Langkah Langkah terkait kinerja dan serapan anggaran	Serapan Anggaran tidak bisa maksimal dari Pos Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya. Terdapat risiko kurang/tidak tercapainya target kinerja	a. Lebih cermat dan teliti dalam penyusunan Perencanaan dan Anggaran b. Menekankan kepada PPK dan PPTK agar lebih tanggap dan responsif terkait penyerapan anggaran dan capaian kinerja baik Individu maupun OPD sesuai dengan Tupoksi.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
PPK dan PPTK belum maksimal dalam mengambil Langkah Langkah terkait kinerja dan serapan anggaran	Terdapat risiko kurang/tidak tercapainya target kinerja	Menekankan kepada PPK dan PPTK agar lebih tanggap dan responsif terkait penyerapan anggaran dan capaian kinerja baik Individu maupun OPD sesuai dengan Tupoksi.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
PPK dan PPTK belum maksimal dalam mengambil Langkah Langkah terkait kinerja dan serapan anggaran	Terdapat risiko kurang/tidak tercapainya target kinerja	Menekankan kepada PPK dan PPTK agar lebih tanggap dan responsif terkait penyerapan anggaran dan capaian kinerja baik Individu maupun OPD sesuai dengan Tupoksi.
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52,00	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
a. PPK dan PPTK belum	Terdapat risiko kurang/tidak	Memerintahkan kepada

maksimal dalam mengambil Langkah Langkah terkait kinerja dan serapan anggaran b. Adanya ASN yang sudah memasuki masa pensiun	tercapainya target kinerja	PPK dan PPTK agar lebih tanggap dan responsif terkait dengan kinerja dengan telah diterimanya TPP dengan harapan kreatifitas kerja dan etos kerja meningkat.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53,00	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
a. PPK dan PPTK belum maksimal dalam mengambil Langkah Langkah terkait kinerja dan serapan anggaran b. Adanya ASN yang sudah memasuki masa pensiun	Terdapat risiko kurang/tidak tercapainya target kinerja	Memerintahkan kepada PPK dan PPTK agar lebih tanggap dan responsif terkait dengan kinerja dengan telah diterimanya TPP dengan harapan kreatifitas kerja dan etos kerja meningkat.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
a. Adanya kelambanan dari Kelurahan pada proses perencanaan dan penyerapan anggaran. b. Belum oftimalnya Desa dan Kelurahan dalam mensikapi program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	a. Kedepanya lebih teliti dan cermat dalam penganggaran b. Menekankan kepada PPK dan PPTK agar lebih tanggap mensikapi permasalahan terkait Tupoksi dan kinerja

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Capain Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patianrowo

No.	Indikator	Capaian Tahun (2024)
1	2	3
1.	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	64,70

Hal ini dibuktikan dengan Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagai berikut :

1. Berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sintem Informasi Kecamatan (SINCAN) mencapai nilai sebesar 64,70.
2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisoner yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai rata-rata dari hasil kuisoner yakni mencapai 50,90.

Sehingga nilai rata-rata sinergitas Kecamatan Patianrowo sebesar 64,70. Hambatan/kendala dari 2 (dua) indikator diatas ialah perbedaan persepsi antar ASN dalam memahami pengisian aspek, subaspek, indikator manajerial dan tujuan organisasi dan cara kerja yang efektif. Sehingga menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan indikator, dengan hal ini sulit untuk mencapai kesepatan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Patianrowo

No.	Indikator	Capaian Tahun (2024)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	96,41
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	0

Dalam Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Patianrowo, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 mencapai 96,41 dari target 92, Sedangkan IKK yang ke 2 (tiga) adalah Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan mencapai 0%. Hal ini disebabkan karena di tahun 2023 tidak ada data yang dapat

dipakai terkait IKK tersebut, dan untuk tahun 2024 sekarang juga tidak ada data lagi, sehingga tidak bisa diukur pada triwulan II.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	77 Nilai	64,70	84,02%
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	92 Nilai	96,41 Nilai	104,79%
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	10%	0%	0%

Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pada Subbab 2.2 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Patianrowo, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Patianrowo, yaitu:

1) ***Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.*** Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) ***Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.***Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) ***Pelayanan Prima.*** Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,

memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) ***Peningkatan Sinergitas Kecamatan.***

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Patianrowo guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5) ***Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.***

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap Langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat nonfisik yaitu sosial, perekonomian dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahanyang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Patianrowo, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Patianrowo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 mengangkat tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideolagi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembagunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Dentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembagunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Geresasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Likungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Patianrowo

Tujuan Kecamatan Patianrowo yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Patianrowo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
					2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai	62
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	92
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang diselesaikan	%	10

Sumber: Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Patianrowo dalam menjalankan pemerintahan yang meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Aspek penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atribut
4. Aspek Pelaksanaan Tugas Delegatif
5. Aspek Inovasi/Kreativitas Kecamatan Pada Segala Aspek Penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dan ketujuh aspek tersebut terangkum menjadi 2 (dua) sasaran perangkat daerah dengan indicator sasaran yang dapat diukur dan diketahui hasilnya melalui penilaian sinergisitas yang dinilai oleh TIM PENILAI dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab.Nganjuk yang dilakukan setiap tahunnya.

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Patianrowo pada tahun 2024:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3.2.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.2.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tabel 3.2
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
NIHIL				

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PATIANROWO KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PATIANROWO							**3.624.133.944,80**	**3.355.642.050,80**	**3.322.977.550,00**	**-301.156.394,08**							**3.962.365.080,80**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.624.133.944,80**	**3.355.642.050,80**	**3.322.977.550,00**	**-301.156.394,08**							**3.962.365.080,80**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.624.133.944,80**	**3.355.642.050,80**	**3.322.977.550,00**	**-301.156.394,08**							**3.962.365.080,80**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**				**75 Nilai**	**75 Nilai**	**3.313.122.794,80**	**3.044.630.900,00**	**2.962.260.500,00**	**143.482.206,00**							**3.456.615.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	10.842.000,00	11.906.000,00	11.906.000,00	964.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		11.009.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.452.000,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			3.539.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.452.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00	964.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			4.609.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.038.000,00	4.038.000,00	4.038.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			3.538.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				62 Dokumen	62 Dokumen	2.622.416.394,00	2.426.575.500,00	2.343.993.500,00	-278.421.894,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		2.666.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.617.260.894,00	2.417.422.000,00	2.334.840.000,00	-282.440.894,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2.560.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2.539.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.467.000,00	3.689.500,00	3.689.500,00	2.222.500,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			1.506.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	1.711.500,00	3.528.000,00	3.528.900,00	1.816.500,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				51 Dokumen	51 Dokumen	76.236.000,00	26.626.000,00	12.670.000,00	-63.566.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		45.600.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	10.620.000,00	10.626.000,00	6.426.000,00	-4.200.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			11.750.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	55.616.000,00	0,00	0,00	-55.616.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			20.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			5.109.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	9 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.750.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	141.315.500,00	141.315.500,00	148.546.500,00	7.231.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		165.650.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.693.200,00	20.693.200,00	21.568.200,00	875.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			25.640.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.968.000,00	11.968.000,00	11.968.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			5.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.144.300,00	40.144.300,00	49.425.309,09	9.281.009,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			45.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0095	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.100.000,00	18.100.000,00	13.150.000,00	-4.950.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			17.718.900,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0098	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			20.059.900,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0099	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.360.000,00	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			30.000.900,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.350.000,00	10.350.000,00	12.375.000,00	2.025.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.759.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*(dielete)* *Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*				14 Unit	14 Unit	113.320.350,00	113.320.200,00	110.751.200,00	-2.569.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		195.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	34.793.350,00	34.793.200,00	37.793.200,00	3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			75.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	78.527.000,00	78.527.000,00	72.958.000,00	-5.569.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			120.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				24 Laporan	24 Laporan	123.950.000,00	105.950.000,00	105.950.000,00	-18.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		137.815.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	61.700.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			101.015.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.250.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	-18.000.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			38.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*				12 Unit	12 Unit	224.843.700,00	224.843.700,00	225.443.700,00	3.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		245.250.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	56.507.700,00	56.507.700,00	61.507.700,00	5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			45.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			9.750.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	161.436.000,00	161.436.000,00	161.436.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			160.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**				**83 %**	**83 %**	**59.592.850,00**	**59.592.850,00**	**58.592.850,00**	**44.857.150,00**							**104.256.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan*				9 Laporan	8 Laporan	41.696.150,00	41.696.150,00	40.696.150,00	-1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		80.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat				9 Laporan	8 Laporan	41.696.150,00	41.696.150,00	40.696.150,00	-1.000.000,00	Kab. Nganjuk, Pallanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			80.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.548.350,00	7.548.350,00	7.548.350,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		8.759.900,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	7.548.350,00	7.548.350,00	7.548.350,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.759.900,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				3 Laporan	3 Laporan	10.348.350,00	10.348.350,00	10.348.350,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		5.530.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tersisa dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	10.348.350,00	10.348.350,00	10.348.350,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			5.530.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**				**85 %**	**85 %**	**66.462.650,00**	**66.462.650,00**	**113.668.150,00**	**-6.462.650,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*				85 Lembaga Kemasyarakatan	85 Lembaga Kemasyarakatan	66.462.650,00	66.462.650,00	113.668.150,00	47.205.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		60.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				77 Lembaga Kemasyarakatan	77 Lembaga Kemasyarakatan	20.097.800,00	20.097.800,00	20.097.800,00	0,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			40.029.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	46.364.850,00	46.364.850,00	43.714.850,00	-2.650.000,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			20.029.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	1 Laporan	0,00	0,00	49.855.500,00	49.855.500,00	Kab. Nganjuk, Patianrowo, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			0,00	KECAMATAN PATIANROWO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**				**66 %**	**66 %**	**31.306.700,00**	**31.306.700,00**	**31.306.700,00**	**-5.306.700,00**							**25.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				8 Laporan	8 Laporan	31.306.700,00	31.306.700,00	31.306.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		25.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	19.856.700,00	19.856.700,00	19.856.700,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pattanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			19.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	11.450.000,00	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pattanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**				**91 %**	**91 %**	**94.725.000,00**	**94.725.000,00**	**89.225.000,00**	**180.275.000,00**							**275.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Pengelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*				259 Orang	259 Orang	94.725.000,00	94.725.000,00	89.225.000,00	-5.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			275.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				259 Orang	259 Orang	94.725.000,00	94.725.000,00	89.225.000,00	-5.500.000,00	Kab. Nganjuk, Pattanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			275.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**				**60 %**	**60 %**	**58.923.950,00**	**58.923.950,00**	**67.923.950,00**	**-17.923.950,00**							**41.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*				11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	58.923.950,00	58.923.950,00	67.923.950,00	9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		41.000.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				56 Dokumen	65 Dokumen	50.225.600,00	50.225.600,00	59.225.600,00	9.000.000,00	Kab. Nganjuk, Pattanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			30.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	8.698.350,00	8.698.350,00	8.698.350,00	0,00	Kab. Nganjuk, Pattanrowo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.500.000,00	KECAMATAN PATIANROWO
		JUMLAH					**3.624.133.944,00**	**3.355.642.650,00**	**3.322.977.550,00**	**-361.158.394,00**							**3.962.361.000,00**	

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Tabel 3.2.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	3.322.977.550

Tabel 3.2.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	92	3.202.445.850	984.360.241
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	10	120.531.700	66.922.000

Tabel 3.2.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif Sebelum Perubahan	Pagu IndikatifSetelah Perubahan	Lokasi
		Uraian (Output)	Target			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**75 nilai**	**3.044.630.900,00**	**3.044.630.900,00**	Kec.Patianrowo
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	***12 dokumen***	***10.906.000,00***	***10.906.000,00***	Kec.Patianrowo
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3.452.000,00	3.452.000,00	Kec.Patianrowo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.416.000,00	4.416.000,00	Kec.Patianrowo
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 laporan	4.038.000,00	4.038.000,00	Kec.Patianrowo
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***62 dokumen***	***2.426.575.500,00***	***2.426.575.500,00***	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	2.417.422.000,00	2.417.422.000,00	Kec.Patianrowo
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	1.956.000,00	1.956.000,00	Kec.Patianrowo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.669.500,00	3.669.500,00	Kec.Patianrowo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan	18 laporan	3.528.000,00	3.528.000,00	Kec.Patianrowo

	an/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***51 dokumen***	***20.620.000,00***	***12.920.000,00***	Kec.Patianrowo
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	10.620.000,00	6.420.000,00	Kec.Patianrowo
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0	0	Kec.Patianrowo
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	5.000.000,00	0,00	Kec.Patianrowo
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 orang	5.000.000,00	6.500.000,00	Kec.Patianrowo
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***7 dokumen***	***141.315.500,00***	***153.765.500,00***	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.693.200,00	22.193.200,00	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.968.000,00	11.968.000,00	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	40.144.300,00	46.444.300,00	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18.100.000,00	13.150.000,00	Kec.Patianrowo
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	Kec.Patianrowo
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	33.360.000,00	33.360.000,00	Kec.Patianrowo

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	umlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.350.000,00	19.950.000,00	Kec.Patianrowo
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	***14 buah***	***113.320.200,00***	***97.621.200,00***	Kec.Patianrowo
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	34.793.200,00	37.793.200,00	Kec.Patianrowo
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	78.527.000,00	59.828.000,00	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***24 laporan***	***123.950.000,00***	***123.950.000,00***	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	81.700.000,00	81.700.000,00	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	42.250.000,00	42.250.000,00	Kec.Patianrowo
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	***12 unit***	***224.943.700,00***	***224.443.700,00***	Kec.Patianrowo
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	56.507.700,00	57.507.700,00	Kec.Patianrowo
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	6.000.000,00	4.500.000,00	Kec.Patianrowo
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	11.000.000,00	11.000.000,00	Kec.Patianrowo
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	151.436.000,00	151.436.000,00	Kec.Patianrowo
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**83 %**	**59.592.850,00**	**58.592.850,00**	Kec.Patianrowo
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	***Jumlah kegiatan koordinasi dengan***	***8 laporan***	***41.696.150,00***	***40.696.150,00***	Kec.Patianrowo

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***perangkat vertical***				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 laporan	41.696.150,00	40.696.150,00	Kec.Patianrowo
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana***	***3 dokumen***	***7.548.350,00***	***7.548.350,00***	Kec.Patianrowo
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	7.548.350,00	7.548.350,00	Kec.Patianrowo
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah warga yang mendapat pelayanan**	***3 laporan***	***10.348.350,00***	***10.348.350,00***	Kec.Patianrowo
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	10.348.350,00	10.348.350,00	Kec.Patianrowo
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**85 %**	**66.462.650,00**	**66.462.650,00**	Kec.Patianrowo
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan***	***77 lembaga/kemasyarakatan***	***66.462.650,00***	***113.668.150,00***	Kec.Patianrowo
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 lembaga kemasyarakatan	20.097.800,00	20.097.800,00	Kec.Patianrowo
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	20 dokumen	46.364.850,00	43.714.850,00	Kec.Patianrowo

	dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
	Peningkatan fektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	49.855.500,00	Kec.Patianrowo
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**	**66 %**	**31.306.700,00**	**31.306.700,00**	Kec.Patianrowo
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***8 laporan***	***31.306.700,00***	***31.306.700,00***	Kec.Patianrowo
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	19.856.700,00	19.856.700,00	Kec.Patianrowo
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonosasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	11.450.000,00	11.450.000,00	Kec.Patianrowo
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Aktif Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**81 %**	**94.725.000,00**	**94.725.000,00**	Kec.Patianrowo
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan***	***250 orang***	**94.725.000,00**	**89.225.000,00**	Kec.Patianrowo
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	250 orang	94.725.000,00	89.225.000,00	Kec.Patianrowo

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**80 %**	**58.923.950,00**	**71.523.950,00**	Kec.Patianrowo
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang***	***99 dokumen***	**58.923.950,00**	**71.523.950,00**	Kec.Patianrowo
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66 dokumen	50.225.600,00	62.825.600,00	Kec.Patianrowo
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 dokumen	8.698.350,00	8.698.350,00	Kec.Patianrowo

Tabel 3.2.4
Daftar Usulan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Nganjuk
Kecamatan Patianrowo

No	Kode Rekeing	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
A	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	***7.01.01.2.05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.620.000	6.420.000	-4.200.000	di geser ke kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 1.500.000 dan di geser ke kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.700.000
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrakan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0	-5.000.000	di geser ke kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 5.000.000
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	6.500.000	1.500.000	dapat tambahan dari kegiatan pemeliharaan mebel sebesar Rp.1.500.000
2	***7.01.01.2.06***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.693.200	22.193.200	1.500.000	Honor pembantu bendahara pengeluaran dirubah menjadi honor pengurus barang sebesar Rp. 6.000.000 dan dapat tambahan dari kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai sebesar Rp. 1.500.000

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.144.300	46.444.300	6.300.000	dapat tambahan dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrakan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 5.000.000, dapat tambahan dari kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatam Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebesar Rp. 1.344.000
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.100.000	13.150.000	-4.950.000	di geser ke kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4.400.000 dan di geser ke kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. 550.000
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.350.000	19.950.000	9.600.000	untuk belanja modal modal arsip di geser untuk perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam sebesar Rp. 5.175.000, dapat tambahan dari kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 550.000, dapat tambahan dari kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 2.569.000, dapat tambahan dari kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatam Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebesar Rp. 1.306.000
3	***7.01.01.2.07***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				

	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.793.200	37.793.200	3.000.000	Belanja modal kursi sofa sebesar Rp. 15.000.000 dirubah menjadi belanja modal meja rapat sebesar Rp. 18.000.000, dapat tambahan pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp.3.000.000
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.527.000	59.828.000	-18.699.000	Belanja modal PC sebesar Rp. 18.699.000 dirubah untuk belanja modal CCT sebesar Rp. 12.000.000 dan kipas angin sebesar Rp. 1.130.000, digeser ke kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp. 3.000.000
4	***7.01.01.2.09***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.507.700	57.507.700	1.000.000	dapat tambahan dari kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebesar Rp. 1.000.000
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	4.500.000	-1.500.000	di geser ke kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 1.500.000
B	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				
1	***7.01.02.2.01***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***				
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.696.150	40.696.150	-1.000.000	di geser ke kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 1.000.000

C	**7.01.03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				
1	***7.01.03.2.01***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***				
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatam Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46.364.850	43.714.850	-2.650.000	di geser ke kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 1.344.000, di geser ke kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. 1.306.000
		Peningkatan fektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	49.855.500	49.855.500	Tambahan
D	**7.01.05**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				
1	***7.01.05.2.01***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.725.000	89.225.000	-5.500.000	di geser ke kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa sebesar Rp. 5.500.000
E	**7.01.06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				

1	***7.01.06.2.01***	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50.225.600	62.825.600	12.600.000	dapat tambahan dari kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp.5.500.000, dapat tambahan dari kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai sebesar Rp. 2.700.000, dapat tambahan dari kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 4.400.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Patianrowo sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Patianrowo Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Patianrowo dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Kecamatan Patianrowo yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Patianrowo Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Patianrowo, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Patianrowo.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Patianrowo dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001